

Pelatihan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) Terhadap Peningkatan Mutu Kelompok Tani di Desa Lawele

La Sianto¹

¹Universitas Muhammadiyah Buton

¹siantho.civil07@gmail.com

Abstrak

Pada tanggal 30 November 2024, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Desa Lawele. Prosedur kerja kegiatan yang dilakukan di Desa Lawele adalah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Desa Lawele untuk membahas mengenai Pelatihan Program P3TGAI Peningkatan Kualitas Kelompok Tani. Membahas pelaksanaan pelatihan dengan Pemerintah Desa Lawele untuk membantu tim pengabdian dalam mencapai tujuan kegiatan yang dilakukan setelah mendapatkan pemahaman mengenai permasalahan yang ada di desa tersebut. Selanjutnya, tim pengabdian dan Pemerintah Desa Lawele melakukan observasi lapangan agar pelatihan dapat dilaksanakan. Tim Pengabdian Masyarakat dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Buton yang melakukan pengukuran ini. Pemerintah Desa Lawele menerima hasil perencanaan saluran irigasi yang selanjutnya didiskusikan dengan masyarakat untuk menentukan langkah pembangunan selanjutnya. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui kerja bakti, yang merupakan konsekuensi langsung dari musyawarah di Balai Desa. Hal ini memastikan bahwa program ini dilaksanakan dengan partisipasi aktif masyarakat. Kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai dengan jadwal.

Kata kunci— Desa Lawele, Irigasi, Partisipasi Masyarakat, Pelatihan P3TGAI, Pengabdian Masyarakat

Abstract

On November 30, 2024, this community service activity was conducted in Lawele Village. The working procedure for the activity included holding a meeting with the Lawele Village Government to discuss the P3TGAI Training Program aimed at improving the quality of farmer groups. Discussions about the implementation of the training were conducted with the Lawele Village Government to assist the community service team in achieving the goals of the program after gaining an understanding of the problems faced in the village. Subsequently, the community service team and the Lawele Village Government conducted field observations to ensure the training could be carried out effectively. The field measurements were conducted by the Community Service Team from the Civil Engineering Study Program at Universitas Muhammadiyah Buton. The Lawele Village Government received the irrigation channel planning results, which were later discussed with the community to determine the next steps for construction. Community participation was carried out through voluntary work (gotong royong), which was a direct outcome of

deliberations held at the Village Hall. This ensured the program was implemented with active participation from the community. The activity proceeded successfully according to the planned schedule.

Keywords— Lawele Village, Irrigation, Community Participation, P3TGAI Training, Community Service

I. PENDAHULUAN

Keberadaan sistem irigasi yang handal merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya sistem pangan nasional yang kuat dan esensial bagi suatu negara. Sistem irigasi merupakan usaha yang dilakukan manusia untuk mendapatkan air dengan menggunakan bangunan dan saluran buatan untuk mengairi lahan pertaniannya. Usaha-usaha tersebut meliputi infrastruktur irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelola irigasi dan sumber daya manusia. Terkait dengan infrastruktur irigasi, diperlukan suatu perencanaan yang baik, agar sistem irigasi yang dibangun merupakan irigasi yang efektif, efisien dan berkelanjutan, sesuai dengan fungsinya yaitu mendukung produktivitas pertanian. Pengalaman berharga telah diperoleh dan sangat bermanfaat bagi kegiatan pembangunan irigasi di Indonesia yang telah berlangsung lebih dari satu abad. Pengalaman-pengalaman tersebut diperoleh mulai dari tahap studi, perencanaan, pelaksanaan, hingga tahap operasi dan pemeliharaan [1].

Kementerian PUPR menetapkan 5 (lima) tujuan dan 5 (lima) sasaran strategis untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pada periode 2020-2024, setiap tujuan strategis akan dicapai dengan target kinerja dan indikator kinerja sasaran strategis. Tujuan sektor Sumber Daya Air adalah meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan efisiensi pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestik, meningkatkan produktivitas pertanian, mengembangkan energi, industri, dan sektor-sektor ekonomi unggulan, serta mengurangi risiko dan kerentanan bencana alam. Tujuan strategisnya adalah meningkatkan ketersediaan air melalui penyelenggaraan infrastruktur sumber daya alam

(RENSTRA PUPS 2020-2024). Tujuan dan sasaran strategis tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai indikator di tingkat operasional. Volume layanan air merupakan salah satu indikator yang kinerjanya diharapkan dapat ditingkatkan dalam rangka meningkatkan produktivitas irigasi. Target kinerja untuk periode 2020-2024 (m³/tahun/ha) adalah sebagai berikut: (a) 19.845 pada tahun 2020, (20.554 pada tahun 2021), 21.263 pada tahun 2022, 21.971 pada tahun 2023, dan 22.680 pada tahun 2024. Kementerian PUPR telah membangun jaringan irigasi kewenangan Pusat hingga tahun 2019, meliputi (a) 2.163,87 km jaringan irigasi, (b) 1.080,20 km jaringan irigasi rawa, (c) 119,90 km jaringan irigasi tambak, dan (d) 295,80 km jaringan irigasi air tanah. Rehabilitasi jaringan irigasi yang telah selesai dilaksanakan adalah: (a) jaringan irigasi sepanjang 6.329,95 km, (b) jaringan irigasi rawa sepanjang 5.139,62 km, (c) jaringan irigasi tambak sepanjang 764,83 km, dan (d) jaringan irigasi air tanah sepanjang 720,11 km. Sementara itu, kegiatan operasi dan pemeliharaan telah dilaksanakan pada (a) 51.312 km jaringan irigasi, (b) 14.770 km jaringan irigasi rawa, dan (c) 478 km jaringan irigasi air tanah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas irigasi, berbagai inisiatif telah dilaksanakan, termasuk dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, terutama masyarakat petani pengguna air. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan salah satu dari program-program tersebut. Program ini merupakan salah satu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan layanan air irigasi untuk mendorong pemerataan pembangunan, mendukung kegiatan ekonomi, dan menjamin ketahanan pangan nasional, khususnya di daerah pedesaan. Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) merupakan program yang dilaksanakan Kementerian PUPR untuk mempercepat peningkatan tata guna air irigasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, kegiatan ekonomi, dan pemerataan pembangunan nasional. Program P3-TGAI merupakan kegiatan swakelola yang melibatkan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, atau Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam rehabilitasi, peningkatan, atau pembangunan jaringan irigasi dengan melibatkan masyarakat petani [3].

Salah satu inisiatif untuk memastikan keberhasilan program ketahanan pangan nasional adalah penyediaan air untuk keperluan irigasi. Kebutuhan irigasi secara signifikan akan memfasilitasi rantai produksi pertanian mulai dari awal pertumbuhan hingga produksi tanaman. Dari tahun ke tahun, kebutuhan pangan pokok masyarakat semakin berkembang. Pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan ketahanan kebutuhan air baku dalam menanggapi peningkatan permintaan ini. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan kerangka dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan yang bertujuan untuk konservasi,

pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pola pengelolaan sumber daya air perlu disusun dalam rangka menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam segala aspek kehidupan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pemerintah harus mengimplementasikan visi yang mengutamakan pelestarian ketersediaan air dan perwujudan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan bagi kesejahteraan rakyat. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bertanggung jawab atas pengaturan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) [4].

II. DASAR TEORI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini tentu harus melakukan studi Pustaka sehingga dasar-dasar dalam pengambilan Keputusan semua dapat dipertanggung jawabkan.

A. Irigasi

Kriteria Perencanaan Parameter Bangunan ini merupakan komponen dari Standar Perencanaan Irigasi, yang mencakup semua bangunan yang diperlukan untuk tujuan komunikasi, transportasi, eksploitasi, dan pemeliharaan, serta bangunan-bangunan yang melengkapi saluran irigasi dan limbah. Bagian ini memberikan penjelasan rinci tentang struktur yang membentuk jaringan irigasi dan drainase. Latar belakang dan dasar hidrolika untuk desain struktur-struktur ini dijelaskan secara rinci dalam deskripsi. Hal ini mengimplikasikan bahwa jenis bangunan tertentu memerlukan penjelasan tersendiri karena karakteristik hidrolisnya yang khas. Bab yang sama akan membahas struktur tambahan yang memiliki banyak dasar hidraulik yang sama. Kriteria perencanaan hidraulik disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan penggunaannya, sejauh hal ini dianggap layak dan sesuai. Namun demikian, dasar teori dari setiap bangunan akan disajikan secara keseluruhan. Perencanaan sebuah bangunan bergantung pada kondisi setempat, yang biasanya tidak konsisten di berbagai wilayah. Hal ini memerlukan strategi yang dapat disesuaikan. Namun demikian, bagian ini memberikan penjelasan yang komprehensif tentang peraturan dan solusi tertentu. Metode dan bahan konstruksi alternatif akan disebutkan bila diperlukan. Apabila jaringan irigasi memerlukan jenis atau beberapa jenis bangunan irigasi yang tidak disebutkan dalam buku kriteria ini, perencana harus berkonsultasi dengan tim ahli mengenai kondisi lapangan. Perencana diharuskan untuk menyajikan argumen dan mengevaluasi semua keuntungan dan kerugian dari jenis-jenis bangunan tersebut [5].

B. Air Bersih

Kebutuhan dasar dan sekunder akan mengalami peningkatan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk. Dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan dari kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ini juga akan meningkat dalam perencanaan tata ruang. Selanjutnya, lingkungan mengalami penurunan daya dukung, perubahan tata guna lahan yang tidak diatur, dan eksploitasi alam yang berlebihan. Efek multi-pemain dari aktivitas-aktivitas tersebut pada dasarnya menghasilkan tren peningkatan bencana baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Banyak ahli telah mencatat bahwa ada paradoks antara populasi dan air. Secara khusus, potensi genangan air meningkat sementara ketersediaan air menurun sebagai akibat dari peningkatan pertumbuhan penduduk. Paradoks ini dicontohkan oleh banjir yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, serta di wilayah lain di Indonesia. Konflik kepentingan dan kebutuhan antara manusia dan air; konflik antara ruang terbangun dan ruang terbuka hijau; konflik antara tata letak bangunan dan tata letak air. Berkurangnya ruang terbuka hijau, terutama di daerah perkotaan, telah menjadi konsekuensi yang signifikan dari peningkatan ruang terbangun. Banyak tempat penampungan air, daerah tangkapan air, ruang terbuka hijau, dan situs air telah dihilangkan [6]

Air adalah kebutuhan mendasar bagi semua organisme hidup di Bumi. Manusia bergantung pada air untuk berbagai keperluan, termasuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan industri, dan kebutuhan produksi. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan air berbanding lurus dengan pertumbuhan populasi, sedangkan siklus hidrologi menjaga jumlah air yang konstan. Hal ini tentu saja akan menimbulkan masalah di masa depan, khususnya krisis air. Air adalah sumber daya yang menopang kehidupan. Air terutama digunakan untuk kegiatan sehari-hari, termasuk minum, mandi, pemanas, dan mencuci. Oleh karena itu, penyediaan air yang cukup menjadi prioritas utama baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Krisis dan kelangkaan air akan terjadi karena ketersediaan air yang tidak mencukupi dibandingkan dengan permintaan air bersih, yang pasti akan menyulitkan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

III. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan PKM ini dilaksanakan di Desa Lawele pada tanggal 30 November 2024. Prosedur kerja kegiatan yang dilakukan di Desa Lawele adalah dengan mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Desa Lawele untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan pengikisan Pelatihan Program P3TGAI Terhadap Peningkatan Mutu Kelompok Tani. Hal ini membutuhkan pelatihan dan pemberian bantuan kepada tani. Tujuan dari pertemuan dengan Pemerintah Desa Lawele adalah untuk memberikan bantuan kepada tim pengabdian dalam mencapai tujuan kegiatan. Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan melihat kebutuhan petani terhadap air irigasi. Pengukuran ini dilakukan oleh Tim Pengabdian

Masyarakat Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Buton. Setelah pengukuran, masyarakat dan Pemerintah Desa melakukan diskusi terkait luas saluran irigasi yang akan direncanakan. Tim pengabdian melaksanakan kegiatan perencanaan sesuai dengan hasil diskusi dengan masyarakat dan pemerintah desa. Pemerintah Desa Lawele kemudian diberikan hasil perencanaan akan diberikan pelatihan untuk melakukan pelaksanaan secara teknis. Setelah proses perencanaan selesai, kami terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Desa Lawele dan masyarakat terkait pembangunan proyek. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah yang tersisa di wilayah pesisir yang memburuk. Untuk mencapai tujuan dari layanan ini, prosedur-prosedur selanjutnya dilaksanakan:

1. Observasi

Tahap ini merupakan tahap awal untuk melihat permasalahan yang ada di lapangan serta melihat Gambaran umum yang ada di Lokasi tujuan

2. Pertemuan Bersama Pemerintah

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Mensosialisasikan rencana pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
- Mendapatkan masukan dari pemerintah desa dan warga terkait kebutuhan dan potensi wilayah.
- Menyepakati peran serta masyarakat dan tim pelaksana dalam program.
- Membahas timeline, lokasi, dan teknis pelaksanaan kegiatan.

Kepala Desa Lawele mengawali pertemuan dengan sambutan hangat, menyampaikan rasa terima kasihnya atas inisiatif Tim Pelaksana KKN yang telah memilih Desa Lawele sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan. Kepala Desa menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan tim pelaksana dalam sambutannya untuk mencapai hasil yang terbaik. Beliau juga membahas potensi dan tantangan yang dihadapi Desa Lawele, termasuk belum adanya pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas warga, terbatasnya akses infrastruktur, dan rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, program yang akan dilaksanakan juga diperkenalkan oleh Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat. Beliau menjelaskan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu komponen dari program pemberdayaan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong pengembangan potensi lokal. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekitar tema [tema kegiatan], yang menekankan pada [rincian tema, seperti pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, atau pembangunan infrastruktur]. Ketua Tim juga menguraikan manfaat dari program ini, termasuk potensinya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Desa Lawele.

Tim pelaksana memberikan gambaran umum yang komprehensif mengenai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan setelah pengenalan ini. Presentasi ini membahas berbagai topik, termasuk tujuan, target, dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Salah satu aspek penting yang dibahas adalah kegiatan utama, yang meliputi [contoh kegiatan: pengadaan peralatan produktif, pembangunan fasilitas umum, atau pelatihan keterampilan]. Selain itu, tim pelaksana juga memberikan penjelasan mengenai sumber daya yang akan digunakan, termasuk tenaga ahli, material, dan fasilitas pendukung. Tim juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat setempat dalam kesempatan ini, yang ditunjukkan melalui partisipasi langsung dan penyediaan informasi mengenai kebutuhan desa yang paling mendesak.

Titik fokus pertemuan ini adalah sesi diskusi. Berbagai masukan dan tanggapan mengenai program yang diusulkan diberikan oleh warga desa yang diwakili oleh beberapa perwakilan masyarakat. Salah satu kendala yang dihadapi petani dalam mengangkut hasil panen adalah kebutuhan mendesak untuk meningkatkan akses jalan menuju lahan pertanian. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menjadi perhatian. Selain itu, beberapa warga mengusulkan agar kegiatan pelatihan diarahkan pada peningkatan keterampilan yang sesuai dengan potensi lokal, seperti penyulingan produk perikanan dan kerajinan tangan. Usulan lainnya adalah perlunya menyediakan alat dan bahan untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi masyarakat, termasuk mesin pengolah hasil pertanian dan perikanan.

Masukan-masukan ini disambut dengan antusias oleh tim pelaksana. Tim PKM menjelaskan bahwa program ini dimaksudkan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Tim pelaksana dan pemerintah desa mencapai kesepakatan mengenai beberapa aksi nyata sebagai hasil dari diskusi tersebut. Komponen awal dari program ini adalah pembangunan akses jalan menuju lahan pertanian, yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi hasil panen. Kedua, pelatihan keterampilan akan berkonsentrasi pada bidang-bidang yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, seperti transformasi teknik pengolahan hasil laut menjadi produk bernilai tambah. Ketiga, tim pelaksana akan menawarkan kepada masyarakat seperangkat alat produktif yang dapat digunakan bersama untuk membantu usaha kecil di desa. Selain itu, pertemuan tersebut membahas pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah desa, tim pelaksana, dan masyarakat setempat. Pemerintah Desa Lawele akan memfasilitasi koordinasi dengan masyarakat dan menyediakan lokasi kegiatan. Untuk sementara, diharapkan masyarakat desa akan terlibat secara aktif dalam semua tahapan pelaksanaan program, termasuk persiapan dan evaluasi. Tim pelaksana bertanggung jawab atas penyediaan tenaga ahli, bahan, dan fasilitas yang diperlukan, serta jaminan bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

3. Survey Lapangan

Tahap ini adalah melakukan survey lapangan setelah kegiatan diterima oleh pemerintah desa. Survey ini bertujuan untuk mendapatkan permasalahan secara langsung dari masyarakat

4. Melakukan Pengabdian

Kegiatan pelayanan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan temuan survei dan observasi dilaksanakan. Tergantung dari kebutuhan desa, kegiatan pelayanan ini dapat berupa penyuluhan, pembangunan fisik, atau pelatihan.

5. Penyerahan Hasil Pengabdian

Tahap ini adalah penyusunan laporan serta peblukasi ilmiah.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Lawele pada tanggal 30 November 2024, Prosedur kerja kegiatan yang dilakukan di Desa Lawele yaitu dengan melakukan pertemuan dengan pihak Pemerintah Desa Lawele terkait Pelatihan Program P3TGAI Terhadap Peningkatan Mutu Kelompok Tani. Setelah mendapatkan permasalahan yang ada di desa tersebut, kemudian melakukan diskusi terkait pelaksanaan pelatihan, dengan tujuan bertemu dengan Pemerintah Desa Lawele yaitu untuk membantu tim pengabdian dalam mencapai tujuan kegiatan yang dilakukan. Pemerintah Desa Lawele bersama tim pengabdian kemudian melakukan observasi ke lapangan untuk melakukan pelaksanaan pelatihan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya pengukuran yang dilakukan oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Buton. Setelah melakukan pengukuran, dilakukan diskusi dengan masyarakat dan Pemerintah Desa terkait bahaya permasalahan persawahan yang ada di Desa Lawele yang terjadi secara terus menerus sehingga akan berdampak jangka panjang, kemudian dilakukan diskusi terkait lebar dan panjang bangunan irigasi dan pelatihan PT3GAI yang akan direncanakan. Setelah mendapatkan hasil dari pertemuan dengan masyarakat dan pemerintah desa, tim kemudian berdiskusi mengenai pelaksanaan pelatihan yang akan direncanakan. Tim kemudian melakukan perencanaan yang kemudian hasilnya akan diberikan kepada Pemerintah Desa Lawele.

Tim kemudian memberikan hasil perencanaan kepada Pemerintah Desa Lawele. Setelah perencanaan dilakukan, kami melanjutkan diskusi dengan Pemerintah Desa Lawele dan masyarakat mengenai pembangunan dan pelatihan yang akan dilakukan sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada petani. Partisipasi masyarakat dalam Kerja Bakti didapatkan dari hasil musyawarah bersama di Balai Desa. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Lawele Kecamatan Pasawajo Kabupaten Buton telah

terlaksana sesuai dengan jadwal. Metode dan rencana pelaksanaan ini dapat terlaksana setelah berdiskusi dengan Kepala Desa Lawele dan Staf Desa Lawele. Proses sosialisasi ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka tim meminta kepada pihak-pihak terkait untuk turut serta dalam kegiatan yang akan dilaksanakan selama proses pengabdian berlangsung. Setelah melakukan diskusi dengan pihak Pemerintah Desa dan melihat kondisi topografi, maka didapatkan perencanaan bangunan pengaman pantai yaitu panjang dengan rincian berdasarkan Gambar 1 dan Gambar 2.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini terdapat beberapa kendala dan tantangan dalam proses perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Beberapa kendala yang ditemui selama kegiatan masih dapat diselesaikan dengan baik selama kegiatan berlangsung. Beberapa kendala yang terjadi di lapangan yaitu pada saat akan pelaksanaan pelatihan, perencanaan irigasi sehingga air bersih yang didapatkan oleh petani menjadi sangat baik dan petani dibekali ilmu yang cukup.



Gambar 1. Sosialisasi Bersama Masyarakat



Gambar 2. Pelatihan Bersama Masyarakat

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Lawele dilaksanakan pada 30 November 2024 dengan fokus utama Pelatihan Program P3TGAI Terhadap Peningkatan Mutu Kelompok Tani. Proses kegiatan diawali dengan diskusi bersama pemerintah desa mengenai permasalahan utama, diikuti oleh observasi dan pengukuran kondisi

masyarakat. Tim dari Program Studi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Buton melakukan pengukuran dan diskusi lanjutan terkait dampak penambangan pasir serta parameter teknis bangunan pengaman pantai yang akan direncanakan.

Hasil perencanaan saluran irigasi diserahkan kepada Pemerintah Desa Lawele, yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah bersama masyarakat untuk menentukan langkah-langkah pembangunan. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui kerja bakti berdasarkan hasil musyawarah di Balai Desa, yang memastikan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan program. Walaupun menghadapi kendala seperti cuaca yang tidak mendukung saat pengukuran dan kurangnya pemahaman warga, kegiatan ini berhasil menyelesaikan perencanaan yang sesuai jadwal dan tujuan. Edukasi kepada masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran terkait ketersediaan air di persawahan.

Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan tim pengabdian, kegiatan ini tidak hanya berhasil mencapai tujuannya tetapi juga memberikan dampak positif jangka panjang dalam upaya melestarikan lingkungan persawahan Desa Lawele

REFERENSI

- [1] Kementerian Pekerjaan Umum dan Direktorat Jendral Sumber Daya Air. Standar Perencanaan Irigasi KP-07: Standar Penggambaran. Jakarta: Kementerian PUPR; 2013.
- [2] Fungsional PDPMDPJ. RENSTRA 2020-2024. vol. 1. 2020.
- [3] Martief LM. Pengembangan Indikator Penilaian Keberhasilan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI). *J Widyaiswara Indones* 2022;3:69–80. <https://doi.org/10.56259/jwi.v3i2.134>.
- [4] Susmono S, Darsono S, Setyo Huboyo H. Konstruksi Pembangunan Jaringan Irigasi Studi Kasus Peningkatan Jaringan Irigasi DI Serayu Sistem Saluran Induk Sumpiuh. *J Profesi Ins Indones* 2023;1:133–8. <https://doi.org/10.14710/jpii.2023.19230>.
- [5] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Jakarta: Kementerian PUPR; 2015.
- [6] Kodoatie RJ, Sjarief R. *Tata Ruang Air*. CV Andi Offset 2010:104658.

